

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era demokrasi yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, semua peraturan perundangan yang membatasi kebebasan berserikat telah dicabut. Sebagai konsekuensinya, lebih dari 100 partai politik lahir dari rahim kemerdekaan berserikat sejak 1999. Dalam jumlah yang lebih besar dan tidak pernah terhitung, aneka ragam organisasi masyarakat tumbuh bagai jamur di musim hujan. Aneka wadah ekspresi masyarakat bahkan bisa lahir dan mati sendiri tanpa harus diberangus oleh kekuasaan.

Semua ini tergantung pada cara pandang dalam melihat keberadaan masyarakat dan ormas itu sendiri. Jika masyarakat selalu dilihat sebagai sumber ancaman, konflik, dan disintegrasi bangsa, seperti Orde Baru, UU yang mengatur ormas diperlukan. Sebaliknya, apabila ormas yang bersifat sukarela dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kolektif bangsa, pengaturan ormas melalui UU jelas tidak diperlukan (Kompas, Edisi 13 Maret 2013: 6).

Pada 2 Juli 2013, DPR akhirnya menyetujui rancangan Undang-Undang organisasi kemasyarakatan untuk disahkan menjadi UU, RUU tersebut dari awal penyusunannya mendapat penolakan dari ormas. Paska disetujui oleh DPR ormas memberi

perlawanan dengan menyiapkan sejumlah uji materi ke Mahkamah Konstitusi (Kompas, Edisi 3 Juli 2013: 1).

Sebelumnya, pengesahan RUU Ormas pernah direncanakan pada 25 Juni 2013 melalui sidang paripurna, namun akhirnya pengesahannya ditunda karena masih ada perbedaan tentang cara memandang hubungan negara dengan organisasi kemasyarakatan. Beberapa substansi dalam draf RUU saat itu perlu dirombak yang meliputi, definisi tidak tetap tentang ormas yang berbadan hukum dan tidak, tentang pencampuran tak proporsional antara ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, Perkumpulan, atau Lembaga Asing, serta soal keharusan asas pancasila (Kompas, Edisi 26 Juni 2013: 15).

Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, belum ada titik temu pandangan dari sebagian organisasi masyarakat (ormas) atau LSM dengan pemerintah. Di sisi lain, ketua panitia khusus (Pansus) RUU Ormas DPR A Malik Haramain mengatakan, RUU ini memiliki cara pandang yang positif terhadap ormas. Menurutnya ormas adalah aset negara yang harus dilindungi, dan RUU tersebut mengupayakan agar kebebasan berserikat dan berkumpul itu tidak mengganggu kebebasan orang lain (Kompas, Edisi 21 Juni 2013: 5).

RUU tersebut dinilai inkonstitusional, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak hakiki warganegara. Ditinjau dari aspek hukum, RUU tersebut dinilai

mengacaukan dan menimbulkan kerancuan kerangka hukum. Badan berupa yayasan ataupun perkumpulan sama-sama dikategorikan sebagai ormas. RUU tersebut berupaya pula mengatur organisasi tidak berbadan hukum, yang sebenarnya sudah dijamin dalam UUD 1945 (Kompas, Edisi 16 Mei 2013: 4).

Setidaknya terdapat 98 lembaga yang menolak UU tersebut diantaranya; PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), The Wahid Institut, Koalisi Kebebasan Berserikat, Perkumpulan Filantropi Indonesia, Koalisi Seni Indonesia, Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (Yapika) (Kompas, Edisi 3 Juli 2013: 1).

**Tabel 1.2**  
**PERSOALAN RUU ORMAS**

<b>Substansi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Sanksi Pelanggaran</b>
Definisi Ormas	Multitafsir dan terlalu luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringatan tertulis</li> <li>• Penghentian kegiatan</li> <li>• Pembekuan /pencabutan izin operasional</li> <li>• Pembekuan /pecabutan izin prinsip</li> </ul>
Sumber dana	Berlebihan dalam pengaturan sumber dana asing	
Pasal larangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mnegancam sikap kritis dan kebebasan berserikat</li> <li>• Berpotensi membubarkan ormas</li> <li>• Banyak larangan yang multitafsir</li> </ul>	

Lingkup wilayah kerja (Nasional, Provinsi, Kabupaten)	Sangat membastasi tumbuhnya banyak ormas	• Sanksi kemigrasian
Ormas yang didirikan warga Negara asing	Banyak dibatasi izin operasional	
Ormas yang berhubungan dengan organisasi politik	Memiliki standar ganda dan diskriminatif	

(Kompas, Edisi 5 Juli 2013: 4)

Sebelum RUU ormas disahkan oleh DPR, UU tentang ormas sudah ada yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. DPR merasa UU tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang dan membentuk panitia khusus untuk merancang UU terbaru tentang ormas. Tanggapan penolakan langsung muncul dari berbagai ormas, lembaga keagamaan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat pekerja, bahkan sebagian parlemen (Gerinda, PAN, Hanura). Pemberitaan tentang persoalan ini menghiasi media massa khususnya media cetak, dan hampir setiap kemunculannya menjadi *headline*. Pemberitaan pro kontra antara DPR dan berbagai lembaga non pemerintah terus menghiasi media massa selama empat bulan hingga akhirnya pada 2 Juli 2013 DPR menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

Sesungguhnya tugas mulia media adalah menyampaikan kebenaran. Namun, menyampaikan kebenaran itu ternyata tidaklah mudah dan sederhana, ada berbagai kepentingan yang “berbicara” yang pada gilirannya memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan. Selalu saja ada ketegangan di antara pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat umum sebagai konsumen berita (Sobur, 2004: viii).

Pers sebagai lembaga kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Apalagi bagi pemerintah yang banyak melakukan banyak kesalahan dan ketidakbenaran, kontrol sosial pers terasa sangat pedih dan sering kali menggoyahkan kelangsungan pemerintahannya. Tetapi pemerintah juga mampu mempengaruhi pers dengan cara memasang rambu-rambu berupa peraturan dan perundangan agar pers bisa ditundukkan.

Dalam melaksanakan misinya, pers harus mempunyai jiwa dan semangat untuk menjalin kesetiakawanan, bantu membantu, saling melakukan kontrol untuk kemajuan bersama. Misalnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar sesamanya, pers harus mampu mencari penyelesaian berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemampuannya mempengaruhi masyarakat (Djuroto, 2004: 6-8).

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa

bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya (Sobur, 2004: 88).

Melalui studi wacana ini, akan diketahui konstruksi berita yang akan ditampilkan oleh harian Kompas. Penulis akan berusaha menemukan konstruksi yang ditampilkan Kompas dalam pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi kemasyarakatan. Bagaimana Kompas mengemas pemberitaan tentang RUU ormas tersebut?

Penulis akan berusaha menemukan bagaimana Kompas mengkonstruksikan wacana dalam pemberitaan pro kontra UU Ormas pasca disetujui oleh DPR. Penulis meneliti masalah di atas dengan judul “Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Surat Kabar Harian Kompas (Edisi Juli 2013)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang penulis angkat adalah: Bagaimana konstruksi wacana surat kabar harian Kompas dalam pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi kemasyarakatan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.1.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan usaha untuk memecahkan permasalahan yang disebutkan dalam perumusan masalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi wacana pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi kemasyarakatan dalam surat kabar harian Kompas.

#### **1.1.2 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan, utamanya dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, terutama konsentrasi penerbitan.

Sedangkan secara praktis diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait tentang pemberitaan suatu media massa, bahwa dalam penyajiannya tidak terlepas dari ideologi wartawan dan media massa tersebut. Juga memberikan sumbangan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang kondisi media massa saat ini, sehingga bisa dijadikan pertimbangan ketika hendak melakukan dakwah melalui media massa.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian, penulis merujuk pada beberapa karya skripsi sebelumnya yang sudah pernah ada, antara lain:

1. Skripsi Puji Lestari Ahditia dengan judul *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri di Harian Seputar Indonesia (Edisi Februari 2010)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wacana. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konstruksi Harian Seputar Indonesia dalam pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah sirri (edisi Februari 2010).

Kesimpulannya adalah Harian Seputar Indonesia nampaknya menggunakan kesempatan praktik ideologinya untuk membangun citra positif kaum feminis Indonesia di mata masyarakat Indonesia. Harian Seputar Indonesia tidaklah keliru, namun, sebagai media massa yang menjunjung tinggi objektivitas, komitmennya untuk menjadi media independen yang bebas dari ikatan keberpihakan patut dipertanyakan. Karena belum mampu terlepas dari keberpihakan pada salah satu pihak setidaknya dalam pemberitaan pro kontra pemidanaan pelaku nikah sirri.

2. Skripsi Zuni Indana Zulfa dengan judul *Analisis Wacana Rencana Pembakaran Alquran oleh Terry Jones Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan September 2010*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis wacana dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi Harian Republika dalam pemberitaan



rencana pembakaran Alquran yang marak diberitakan di berbagai media massa selama bulan September 2010.

Hasilnya adalah koran Republika mencoba mengkonstruksi kepada pembacanya untuk turut menolak rencana Terry Jones yaitu membakar Alquran. Karena menganggap bahwa umat Islam adalah teroris yang harus diperangi. Konstruksi yang ingin dibangun wartawan Republika mengenai pemberitaan rencana pembakaran Alquran oleh Terry Jones adalah menolak dengan keras aksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ideologi harian Republika yang sangat menjunjung tinggi nilai Islam dan aksi Terry Jones yang menghina kitab suci umat Islam (Alquran).

3. Skripsi Richa Miskiyya dengan judul *Orientasi Pengembangan Wacana Pemberitaan tentang Kh. Abdurrahman Wahid (Study Analisis Pemberitaan SKH Kompas edisi Januari 2010)*. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana konstruksi Surat Kabar Harian Kompas dalam pemberitaan tentang KH. Abdurrahman Wahid. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, spesifikasinya adalah deskriptif dengan pendekatan wacana.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Kompas memiliki konstruksi berita yang cenderung pada sikap dukungan akan sepak terjang Gus Dur tentang pluralisme dan dukungan terhadap pengajuan gelar Pahlawan terhadap Gus

Dur. Kompas banyak mengangkat latar belakang sikap pluralisme Gus Dur semakin menegaskan jika Kompas lebih mengupas sosok Gus Dur dalam berita sebagai seorang pluralis bukan sebagai seorang mantan Presiden maupun Kiai.

Analisis keagamaan, penulis melihat berita-berita apabila dilihat dari kaca mata keagamaan termuat sikap-sikap toleransi seperti dalam Alquran dan Hadits. Kompas menggunakan kesempatan praktik ideologinya untuk membangun citra positif seorang KH. Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan pluralisme di mata masyarakat Indonesia.

4. Skripsi Novi Maria Ulfa dengan judul *Analisis Wacana Mengenai Pemberitaan Aktifis Muslim di Maalah Tempo Tahun 2003 Pasca Tragedi Bom J.W Marriot*. Tujuannya untuk mengetahui penggambaran dan penampilan majalah Tempo mengenai pemberitaan aktifis Muslim pasca tragedy bom J.W Marriot tahun 2003. Untuk mengetahui makna laten dalam pemberitaan aktifis Muslim yang diduga sebagai pelaku pengeboman hotel J.W Marriot. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan sistematis terkait secara keseluruhan, tidak tumpu pada pengukuran. Penulis menggunakan analisis kognisi sosial, yang dikenal dengan pemikirannya Teun A Van Dijk.

Hasil yang paling penting dari penelitian ini adalah wacana dari pihak kepolisian yang banyak mendominasi

makna dalam pemberitaan yang didukung melalui grafis dan statmen dalam pemberitaan. Bagi peneliti, hal ini wajar karena Tempo akan lebih mudah mendapat berita dari pihak kepolisian. Selain itu, aparat kepolisian mempunyai akses dan kuasa yang lebih besar terhadap media daripada para aktifis Muslim. Sehingga secara tidak langsung pihak kepolisian mempunyai wacana yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap publik. Baik atau buruknya para aktifis Muslim di hadapan publik tergantung pada pihak kepolisian.

Beberapa Skripsi yang penulis jadikan rujukan tidak dapat dipungkiri ada berbagai kesamaan. Diantaranya adalah dalam karya ilmiah tersebut, mereka menjadikan media massa cetak sebagai objek penelitiannya dan menggunakan analisis wacana sebagai pendekatannya. Ketiga karya ilmiah tersebut mengambil media yang berbeda, Puji Lestari Ahditia mengambil dari koran Seputar Indonesia, Zuni Indana Zulfa dari Republika, Rica Miskiyya dari harian Kompas dan Novi Maria Ulfa dari majalah Tempo. Kesamaan ketiga penelitian di atas terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang mereka pakai yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan wacana, adapun model wacana yang dipilih adalah model wacana Teun A Van Dijk.

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada objeknya. Puji Lestari Ahditia membidik Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri di Harian Seputar

Indonesia tahun 2010, Zuni Indana Zulfa membidik pemberitaan Rencana Pembakaran Alquran Oleh Terry Jones Dalam Surat Kabar Harian Republika tahun 2010, Richa Miskiyya membidik Orientasi Pengembangan Wacana Pemberitaan tentang KH. Abdurrahman Wahid pada harian Kompas tahun 2010 dan Novi Maria Ulfa mengangkat tentang Analisis Wacana Mengenai Pemberitaan Aktifis Muslim di Maalah Tempo Tahun 2003 Pasca Tragedi Bom J.W Marriot. Sedangkan pada penelitian ini penulis membidik tema pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi kemasyarakatan pada harian Kompas tahun 2013.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.1.3 Jenis dan Pendekatan**

Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam, data yang mengandung makna. Makna adalah data sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2011: 9).

Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada

latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh) (Moleong, 1993: 3).

Penulis menggunakan pendekatan wacana yang dikembangkan oleh Teun A Van Dijk. Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu produksi yang harus juga diamati. Harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu (Eriyanto, 2006: 221).

#### 1.1.4 Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini adalah berita Harian Kompas edisi Juli 2013. Alasan penulis mengambil bulan Juli karena intensitas berita yang cukup untuk diteliti pasca disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema, baik itu dari buku,

jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, artikel, internet, dan penelitian-penelitian lain (Sugiyono, 2011: 225).

#### 1.1.5 Definisi Konseptual

Penelitian akan difokuskan pada pemberitaan dalam media massa khususnya media yang berbentuk koran yaitu Surat Kabar Harian Kompas. Fokus penelitian ini adalah mengenai pemberitaan, oleh karena itu penulis hanya akan menjelaskan tentang berita atau informasi berupa laporan fakta yang aktual. Seperti definisi berita oleh Williard C. Bleyer, dalam Barus, berita adalah suatu kejadian aktual yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau mempunyai makna bagi pembaca (*newspaper writing and editing*) (Barus, 2010: 26).

Praktek jurnalistik para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H (*what, why, when, where, who+ how*). Berita di atas sering disebut sebagai berita langsung (*straight news*) (Barus, 2010: 36-37). Penelitian akan difokuskan pada berita langsung (*straight news*) dalam harian Kompas edisi Juli 2013. Adapun pemberitaan yang akan diteliti mengenai pemberitaan pro kontra undang-undang organisasi

kemasyarakatan dalam surat kabar harian Kompas (Edisi Juli 2013).

#### 1.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi. Penulis mendokumentasikan berita dalam harian Kompas pada edisi Juli 2013. Penulis juga mendokumentasikan buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, artikel yang dapat menunjang penelitian ini.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis teks tersebut dengan menggunakan analisis wacana model Teun Van Dijk, seorang professor di Universitas Amsterdam. Untuk menggambarkan modelnya, Van Dijk membuat banyak sekali studi analisis pemberitaan media. Model Van Dijk sering disebut sebagai kognisi sosial (Eriyanto, 2001: 222)

Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling

mendukung, ia membagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Lebih jelasnya dimensi teks bisa dilihat pada tabel berikut: (Eriyanto, 2001: 228-229).

**Tabel 1.3**

**Tabel Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk**

<b>Struktur Wacana</b>	<b>Hal Yang Diamati</b>	<b>Elemen</b>
Struktur Makro	<b>Tematik</b> Tema/topik yang dikedepankan berita	Topik
Superstruktur	<b>Skemantik</b> Bagaimana bagian dan urutan berita dikemaskan dalam berita utuh	Skema
Struktur Mikro	<b>Semantik</b> Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita	Latar, detail, maksud, pra anggapan, nominalisasi
	<b>Sintaksis</b> Bagaimana kalimat yang dipilih dalam berita	Bentuk, kalimat, koherensi, kata ganti
	<b>Stilistik</b> Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon
	<b>Retoris</b> Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, metafora, ekspresi



Pada level kedua, yaitu dimensi kognisi sosial mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan level ketiga yaitu dimensi konteks sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah (Eriyanto, 2001: 224).

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan. Sistematika dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan jenis penelitian, definisi konseptual, sumber data, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bagian akhir dari pendahuluan adalah sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua yaitu landasan teori yang akan menerangkan media massa utamanya surat kabar, berita, konstruksi, dan wacana.

Bab ketiga akan menampilkan gambaran umum media yang diteliti yaitu Harian Kompas dan data pemberitaan UU Ormas.

Bab keempat adalah Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Surat Kabar Harian Kompas (Edisi Juli 2013).

Bab kelima adalah bab yang terakhir, memberikan simpulan dari penelitian yang telah berlangsung, saran-saran dan penutup.